

BAB III

KEBIJAKAN EKONOMI SBY-KALLA

Bab ini membahas kebijakan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) terkait kebijakan privatisasi dan pengimplementasian kebijakan ekonomi pasar yang dilakukan SBY-Kalla.

A. Kebijakan ekonomi pasar SBY-Kalla

Di pilihnya Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Jusuf Kalla (JK) sebagai Presiden dan wakil Presiden mencerminkan tingginya harapan rakyat akan perubahan ekonomi dengan adanya pergantian Presiden di Indonesia. Minggu pertama di bulan Desember 2004, Presiden terpilih SBY menandatangani kanvas anti korupsi, yang menandai tindakannya yang menyetujui tindakan anti korupsi. Dalam kanvas tersebut, SBY menuliskan pesan "Mari kita bangun Indonesia yang bersih-bersih dari korupsi". Ketika pidato 30 hari pertama pemerintahannya, SBY menjelaskan tiga strategi dalam bidang ekonomi yang disebut *triple strategy* yaitu: mencapai pertumbuhan ekonomi 6,5 persen pertahun, menggerakkan kembali sektor ril, serta revitalisasi pertanian dan perekonomian pedesaan. Untuk program 100 hari pertama Kabinet Indonesia Bersatu, presiden meminta para menteri agar menyusun program yang dapat memberi keyakinan pada masyarakat bahwa pemerintah paham dan mengetahui apa yang diharapkan dan apa yang menjadi persoalan masyarakat.¹

Salah satu kebijakan pada masa kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono dan Jusuf Kalla yaitu mengurangi subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM), atau

¹ Mudrajad Kuncoro. 2005. "Menanti Reformasi Iklim Bisnis di Indonesia". *UNISIA* No. 5. Hal 3.

dengan kata lain menaikkan harga BBM. Kebijakan ini di latar belakangi oleh naiknya harga minyak dunia, anggaran BBM di alihkan ke subsidi sektor pendidikan dan kesehatan serta bidang-bidang yang mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat.² Keputusan DPR menyetujui rencana kenaikan harga BBM pada 1 Oktober 2005 diambil melalui rapat Paripurna selasa malam 27 September 2005 sebagai disahkannya RUU tentang perubahan kedua atas UU Nomor 36/2004 tentang APBN 2005. Pengesahan RUU ini dilakukan dengan voting terbuka setelah adanya perbedaan pendapat diantara fraksi-fraksi yang ada di DPR.³

Dari hasil kenaikan BBM tersebut justru angka kemiskinan meningkat dari 31, 1 juta jiwa tahun 2005 menjadi 39, 3 juta jiwa pada tahun 2006. Selain itu inflasi mengalami kenaikan tajam sebesar 17, 75% pada tahun 2006. Di sisi industri, kenaikan harga BBM pada tahun 2005 tersebut telah mampu mendorong percepatan deindustrialisasi, jika pada tahun 2004 sektor manufaktur masih tumbuh 7, 2% maka pada tahun 2007 hanya tumbuh sebesar 5, 1%. Ini terjadi karena industri terus ditekan dari dua sisi yakni dari peningkatan biaya produksi dan merosotnya *demand* akibat menurunnya daya beli masyarakat. Program yang diwacanakan akan dilakukan pada pemerintah SBY adalah memberikan bantuan kepada masyarakat miskin yaitu program Bantuan Langsung Tunai (BLT) pada tahun 2005 pemerintah SBY telah memberikan BLT sebesar Rp 100.000 per bulan per keluarga bagi keluarga miskin selama satu tahun. Terdapat banyak kelemahan dari program ini antara lain besaran BLT tidak dapat mengkonversi tambahan beban orang miskin karena jumlah tersebut adalah hasil perhitungan jika harga BBM naik 30-40%, sementara fakta yang terjadi adalah BBM naik

² Amir Machmud. 2016. *Perekonomian Indonesia Pasca Reformasi*. Erlangga: Gelora Aksara Pratama. Hal 13.

³ Muhammad Hairul Shaleh. 2005. "Kebijakan Pemerintahan Sby-Jk Tentang Kenaikan Harga BBM 1 Oktober 2005". *Jurnal Sosial-Politika*. Vol. 6, No. 12. Hal 45-46.

sampai 126%, selain itu juga terdapat salah sasaran dari diberikannya bantuan yang seharusnya di dapat oleh keluarga miskin.⁴

Kabinet Indonesia Bersatu SBY-JK yang kala itu baru terbentuk telah membayar utang kepada IMF sebesar Rp 126,315 triliun dan pada 2005 cicilan utang pokok Rp 61,614 triliun dan bunga Rp 64,691 triliun lebih rendah Rp 17,2 triliun dari yang dianggarkan, karena mendapat penundaan pembayaran utang akibat bencana tsunami di Aceh dan Nias. Dalam APBN 2006 untuk pembayaran utang dalam dan luar negeri pemerintah telah mengalokasikan Rp 140,22 triliun (4 kali lebih besar dari pada anggaran pendidikan yang dianggarkan Rp 34 triliun). Rinciannya: pembayaran beban bunga Rp 76,63 triliun dan cicilan utang pokok Rp 63,59 triliun. Jauh lebih besar daripada *opportunity lost* (selisih antara harga BBM bila dijual di luar negeri dengan harga BBM) yang diubah menjadi subsidi (sekitar Rp 95 triliun). Atas tekanan IMF mesti di kurangi sampai nol dalam tenggat waktu yang telah ditentukan.⁵

Selain itu SBY tetap mempertahankan keterikatan Indonesia dengan pihak AS pada skala global maupun skala regional. Dalam skala global, Indonesia tetap merujuk kepada pusaran sentripetal kekuasaan hegemonik AS dan sekutunya seperti Jepang. Dalam skala regional, Indonesia tetap mempertahankan dua orientasi regionalisnya kepada ASEAN dan APEC. Kunjungan ke luar negeri yang pertama Presiden SBY adalah KTT APEC di Santiago, Chile.⁶

⁴ Riky Ridyasmara. 2008. Kenaikan BBM, kebijakan panik dan zalim pemerintahan SBY-JK. *Eramuslim*, 11 Mei. Tersedia Online Melalui: https://www.erasuslim.com/berita/tahukah-anda/kenaikan-bbm-kebijakan-panik-dan-zalim-pemerintah-sby-jk.htm#.XI7fjbhS_IV, diakses 18 Maret 2019.

⁵ Ishak Rafick. 2007. *Catatan Hitam Lima Presiden Indonesia*. Jakarta: Ufuk Publishing House. Hal 43-44.

⁶ Agus R. Rahman. 2005. "Politik Luar Negeri Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono terhadap Eropa". *Jurnal Penelitian Politik*. Vol 2, No. 1. Hal 60.

Kebijakan SBY-Kalla yang mengarah kepada Neoliberalisme dapat dilihat dengan disahkannya UU tentang penanaman modal asing yaitu UU No 25/2007 dalam UU PMA yang baru tersebut, modal asing tidak lagi dibatasi. Hak guna usaha bisa 94 tahun dan jika waktunya sudah habis, bisa diperpanjang hingga 35 tahun lagi. Selain itu tidak ada lagi perlakuan berbeda antara modal asing dan domestik. Untuk merangsang investasi asing, pemerintah menerapkan kebijakan deregulasi, pemberian insentif, pemberlakuan zona bebas perdagangan, dan pengurangan pajak bagi perusahaan multinasional. Hal ini menyebabkan merosotnya pendapatan negara, karena kerugian ditutupi dengan menaikkan pajak untuk sektor usaha di dalam negeri atau penciptaan berbagai jenis pajak untuk rakyat, pemerintahan SBY juga merangsang investasi dengan bersandar pada tenaga kerja murah. Ditambah dengan pemberlakuan pasar tenaga kerja yang fleksibel: sistem kerja kontrak dan *outsourcing*.⁷

Setelah UU Nomor 25 Tahun 2007, UU turut diikuti dengan peraturan presiden nomor 77 Tahun 2007 yang mengatur tentang bidang yang tertutup dan terbuka terhadap penanaman modal asing. Instrumen peraturan Pemerintah menjadi pemilah sektor investasi yang diproteksi dan tidak dari pengaruh asing. Peraturan juga memperjelas bidang usaha yang memperbolehkan adanya investor asing dengan porsi kepemilikan tertentu atau daftar negatif investasi. Sektor bidang usaha bank devisa dan non devisa, bank Syariah, dan perusahaan pialang pasar uang adalah contoh yang terbuka dengan PMA. Porsi kepemilikan modal asing pun dapat mencapai 99 persen. Hal yang sama terjadi di bidang pengeboran migas di darat dan pembangkit tenaga listrik juga diperbolehkan dimodali asing hingga 95 persen. Di akhir 2007 terlihat hasil dari banyaknya investasi,

⁷ Sigit Budiarto. 2012. "Beberapa ciri Neoliberal Sistem Ekonomi Rezim Sekarang". *BerdikariOnline*, 18 Juli. Tersedia Online Melalui: <http://www.berdikarionline.com/beberapa-ciri-neoliberal-sistem-ekonomi-rezim-sekarang/>, diakses 12 Januari 2019.

realisasi PMA naik menjadi Rp 97,41 triliun dari sebelumnya Rp 53,91 triliun pada 2006. Sedangkan PMDN pun turut meningkat, walaupun tidak begitu signifikan, dari Rp 20,79 triliun pada 2006 menjadi Rp 34,88 triliun pada 2007.⁸

Bab ini telah membahas kebijakan ekonomi yang dilakukan oleh SBY-Kalla selama pemerintahannya seperti menaikkan BBM, mengesahkan undang-undang tentang penanaman modal asing, dan mengkampanyekan ekonomi yang bersih dari korupsi.

Akibat dari bantuan dana oleh IMF dan bank dunia pemerintahan SBY-Kalla selama menjadi presiden pada periode pertama (2004-2009) menunjukkan bahwa presiden mengikuti instruksi kebijakan ekonomi dari IMF dan Washington *Consensus* dengan melakukan privatisasi, yang sebelumnya pernah dilakukan oleh presiden Megawati. Di samping itu SBY mengesahkan undang-undang privatisasi dan undang-undang terkait PMA sehingga membuat asing menjadi leluasa untuk mengeksploitasi BUMN dan kekayaan Indonesia sehingga bergantung kepada pemodal asing.

Selain itu pada pemerintahan SBY ada program privatisasi yang setiap tahun dilakukan dengan wacana akan memprivatisasi sekian banyak BUMN, dan hasilnya hanya sedikit BUMN mampu untuk di privatisasi.

⁸ Hanif Gusman. 2018. "Pasang surut investasi asing tergantung rezim yang berkuasa". *Tirto*, 11 Oktober. Tersedia Online Melalui: <https://tirto.id/pasang-surut-investasi-asing-tergantung-rezim-yang-berkuasa-c6bK>, diakses 11 Januari 2019